

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah. Pembahasan terdiri dari dua subbab, yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya *Mouvement de Libération des Femmes* dan subbab kedua adalah dampak *Mouvement de Libération des Femmes* terhadap perkembangan feminisme radikal di Prancis. Meskipun dari aspek waktu yang dibatasi oleh penulis yaitu pada tahun 1960-an hingga tahun 2000-an, namun untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi *Mouvement de Libération des Femmes* dimulai pada tahun 1800-an karena gerakan feminisme di Prancis bersifat berkelanjutan dan saling berkaitan.

4.1 Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Munculnya *Mouvement de Libération des Femmes* di Prancis

Amerika Serikat menjadi awal munculnya feminisme gelombang ke dua yang liberal dan radikal. Gerakan pembebasan perempuan (*Women's Liberation Movement*) di Amerika Serikat terjadi pada tahun 1960. Gerakan ini muncul sebagai reaksi ketidakpuasan perempuan atas berbagai diskriminasi yang mereka alami meskipun emansipasi secara hukum dan politis telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama (2013, Swastini, hal 201). Tidak hanya di Amerika, gerakan

ini juga berlangsung di beberapa negara di Eropa seperti Inggris, Jerman, Prancis hingga Rusia.

Di Prancis, peristiwa 1968 menjadi awal kebangkitan gerakan feminisme yang militan. Pada tahun 1970, peristiwa *Mouvement de Libération des Femmes* terjadi. Perempuan yang menamakan dirinya aktivis MLF berdiri di depan *l'Arc de Triomphe* dan meletakkan karangan bunga untuk menghormati pahlawan yang gugur lalu dilanjutkan dengan melakukan aksi demonstrasi menuntut pembebasan perempuan. Setelahnya, kesadaran perempuan untuk mendapatkan hak pendidikan meningkat dan banyak perempuan yang melibatkan diri di dunia pendidikan dan politik. Hal ini berdampak pada menurunnya angka kelahiran dan perekonomian Prancis meningkat di tahun 1950-1975. Berbagai faktor melatarbelakangi *Mouvement de Libération des Femmes* tersebut, dan penelitian ini akan membahas faktor politik, faktor sosial, dan faktor budaya.

4.1.1 Faktor Politik

Sejarah panjang feminisme di Prancis tidak lepas dari perjuangan perempuan pada abad ke-18 untuk mendapatkan hak mereka. Posisi kaum perempuan di Prancis pada masa itu sangat ter subordinasi. Konstitusi Prancis tahun 1792 secara tegas melarang wanita dari kehidupan publik dan Kode Sipil Kaisar Napoleon tahun 1804 yang kemudian diimplementasikan di sebagian besar benua Eropa menolak hak perempuan yang sudah menikah untuk bercerai,

pernikahan anak perempuan diatur oleh ayah dan mengharuskan perempuan patuh terhadap suami dan membatasi ruang gerak mereka di publik.⁵

Feminisme gelombang pertama di Prancis ditandai dengan perjuangan Marie Olympe de Gouges yang merupakan salah satu tokoh feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan pada abad ke-18. Gerakan Marie Olympe de Gouges yang paling berpengaruh ialah membuat *La Declaration des droits de la femme et de la citoyenne* (Deklarasi Hak Asasi Perempuan dan Warga Negara Perempuan) yang mencantumkan seluruh hak perempuan sebagai warga negara, termasuk hak berpolitik. Sejarah mencatat gerakan awal feminisme di Prancis dan dunia barat lainnya berakhir pada abad ke-19. Gerakan feminisme pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 terus berlanjut di Prancis, namun gerakan tersebut hanya meneruskan perjuangan para feminis dan tidak mengubah posisi perempuan saat itu.

Tahun 1944, perempuan mendapatkan hak pilihnya dalam bidang politik di Prancis. Setelah itu, gerakan *La Maternité Heureuse* tahun 1956 yang dilatarbelakangi oleh fenomena *baby bomb* yaitu tidak terkendalinya angka kelahiran dikarenakan pelarangan penggunaan alat kontrasepsi untuk menekan kelahiran. Pada masa itu banyak ibu yang menjadi orangtua tunggal. Menurut de Beauvoir (2016, dikutip dari Toni dkk, hal 300-305) angka pengguguran kandungan saat itu sangat tinggi, dan mereka melakukannya secara ilegal hingga mengancam jiwa mereka. Rata-rata yang melakukan tindakan ini adalah perempuan kelas menengah ke bawah yang tinggal dalam kemiskinan, wilayah padat penduduk. Gerakan ini tidak hanya menuntut pelegalan alat kontrasepsi

melainkan juga mengedukasi masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi, pengguguran kandungan yang aman dan wacana tentang keluarga berencana.⁶ Baru pada tahun 1967, akhirnya parlemen mengesahkan undang-undang *Neuwirth*, yaitu undang-undang yang mengesahkan penggunaan alat kontrasepsi. Meskipun penggunaan alat kontrasepsi sudah tidak dilarang di Prancis, namun undang-undang tersebut banyak menuai protes dari beberapa kalangan seperti tokoh gereja dan partai sayap kiri, penyebaran iklan tentang alat kontrasepsi pun masih sangat dibatasi dan baru pada tahun 1972 undang-undang ini baru benar-benar dilaksanakan.

Perjuangan perempuan terus berlanjut hingga pada 13 Juli 1965 parlemen mengesahkan peraturan yang menyatakan dalam kepala keluarga sudah tidak lagi berjalan seiring otoritas "ayah" digantikan oleh otoritas "orang tua" dan perempuan bebas memilih profesinya sendiri dan berhak membuka rekening tanpa seizin suami.⁷

MLF menjadi sebuah revolusi jati diri bagi perempuan dan bisa terjadi karena kegigihan para pembaharu feminis. Gerakan ini menuntut kebebasan perempuan untuk berekspresi dan melakukan pengguguran kandungan. Berkat perjuangan Simon Veil yang saat itu menjabat sebagai menteri kesehatan Prancis. Pada tanggal 17 Januari 1975 Rancangan Undang-Undang *Veil* disahkan oleh parlemen, yaitu undang-undang yang melegalkan pengguguran kandungan bagi calon ibu di Prancis.⁸ Veil bertujuan agar tidak ada lagi perempuan yang melakukan pengguguran kandungan secara ilegal. Empat tahun kemudian

tepatnya pada tanggal 31 Desember 1979 RUU ini secara sah masuk ke Undang-Undang kesehatan Prancis.⁹

Dari pemaparan fakta tersebut, dapat dilihat tujuan feminisme gelombang pertama yaitu memperjuangkan hak politik dan kesetaraan jender bagi perempuan dalam kehidupan bernegara di Prancis. Setelah feminisme gelombang pertama berakhir, dan sebelum MLF muncul, perempuan Prancis sudah memperjuangkan hak kebebasan reproduksi mereka yang dibuktikan dengan disahkannya beberapa undang-undang terkait kehamilan dan pengguguran kandungan.

4.1.2 Faktor Sosial

Buku *The Second Sex* yang ditulis oleh Simone de Beauvoir yang terbit tahun 1949 banyak mempengaruhi pemikiran perempuan Prancis dan dunia pada saat itu. Dalam bukunya, Beauvoir menyatakan perempuan ditakdirkan untuk menikah dan melahirkan tanpa memiliki hak lainnya (2016, dikutip dari Toni dkk, hal, 502). Dengan asumsi seperti itu, posisi perempuan teropresi oleh kaum laki-laki yang memperlakukan mereka sebagai objek seksual semata. Perempuan dibentuk sejak masih anak-anak untuk menerima, menunggu, bahkan bergantung. Mereka juga di doktrin untuk percaya bahwa nantinya akan ada seorang laki-laki yang datang menyelamatkan hidupnya dan melindunginya untuk selamanya seperti dalam cerita dongeng maupun mitos masyarakat.

Dari hal tersebut Beauvoir mengungkapkan bahwa unsur ketergantungan perempuan tidak hanya bersumber dari mitos masyarakat saja, namun terlalu

banyak faktor kehidupan di dalam sejarah yang tidak memungkinkan perempuan untuk mandiri.¹⁰ Patriarki menjadikan perempuan sebagai *liyan*, patriarki memposisikan kaum perempuan sebagai minoritas dalam kehidupan keluarga dan sosial. Di masa Renaissance dewan gereja memutuskan bahwa perempuan tidak perlu belajar membaca, berhitung dan menulis, karena perannya hanyalah menjadi ibu dan istri. Doktrin gereja inilah yang mengekang hak-hak perempuan untuk mengembangkan diri dan memiliki akses pendidikan, begitu juga dengan hak-hak sipil perempuan yang terpinggirkan karena perempuan dipandang sebagai masyarakat kelas dua.¹¹ Pada masa itu perjuangan perempuan harus berjuang berdasarkan kelas sosialnya, perempuan kelas rendah diharapkan menjadi ibu rumah tangga dan mengurus segala hal yang berhubungan dengan rumah. Perempuan kelas pekerja diwajibkan bekerja untuk suami mereka dan membantu menjalankan roda bisnis keluarga, sedangkan perempuan kelas atas meskipun tidak bekerja mereka tetap harus mengurus rumah. Sementara itu, perempuan lajang harus tinggal bersama kerabat laki-laki atau tinggal di biara menjadi biarawati. Selama berabad-abad perempuan hanya diposisikan menjadi pengikut laki-laki.¹²

Sejak awal perjuangan perempuan dari abad ke-18 hingga akhir abad ke-19, perempuan berhasil memperjuangkan kesetaraan jender, namun perjuangan perempuan terhenti saat pemerintahan Vichy berkuasa tahun 1940-1944. Pemerintahan Vichy adalah pemerintahan darurat yang dijalankan bersama pemerintahan Jerman setelah era republik ke tiga berakhir karena kekalahan yang dialami oleh militer Prancis.^{13 14} Pemerintahan ini dipimpin oleh Marshal Pétain.

Pemerintahan ini memiliki tiga prinsip utama yaitu *travail, famille, patrie* (bekerja, keluarga dan tanah air).

Prinsip keluarga yang berisi:

*“l’Etat Français honore les familles nombreuses, et de manière plus générale la femme au foyer (instauration de la fête des mères). Pour protéger la famille, le divorce est rendu quasiment impossible et l’avortement est sévèrement condamné.”*¹⁵

“Negara Prancis menghormati keluarga besar, dan lebih umum lagi ibu rumah tangga (pengenalan Hari Ibu). Untuk melindungi keluarga, perceraian dianggap tidak mungkin dan aborsi sangat dikutuk.”

Prinsip kedua menekankan bahwa peran perempuan hanya di dalam keluarga sebagai ibu dan perempuan harus berperan sesuai kodratnya tanpa terkecuali. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah saat itu secara langsung membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik dan hanya boleh berada di wilayah domestik. Namun demikian, hal tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 1944, perempuan di Prancis mendapatkan hak pilihnya. Jendral Charles de Gaulle mendeklarasikan di hadapan *Assemblée Consultative Provisoire* bahwa pemerintahan yang baru harus berisikan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh warga Prancis, baik laki-laki maupun perempuan. Ini merupakan wujud perlawanan pada 29 April 1945 perempuan Prancis memberikan hak suara langsung di pemilihan umum.¹⁶

Dalam perjalanannya, perempuan Prancis tidak hanya memperjuangkan hak-hak politiknya namun juga hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Meskipun peraturan kesetaraan gender dalam pendidikan Prancis sudah lama

diterapkan, tetapi pada praktiknya sistem pendidikan Prancis juga memiliki unsur ketidakseimbangan antara jenis kelamin.¹⁷



Gambar 4.1 *Mouvement de Libération des Femmes* yang terjadi di Prancis 20 November 1970

Saat peristiwa Mei 1968 pecah di Prancis, pelajar Prancis memulai gerakan pemberontakan terhadap pemerintah. Antara tahun 1967 hingga 1970 dibentuklah asosiasi *Féminin, Masculin, Avenir* (FMA) yang melakukan agenda diskusi tentang kesetaraan gender di kalangan pelajar Prancis.¹⁸ Inilah yang menjadi cikal bakal MLF yang muncul pada tahun 1970. Beberapa tokoh seperti Simone de Beauvoir, Jacques Demy dan Monique Wittig ikut andil dalam gerakan ini.

4.1.3 Faktor Budaya

Pada subbab ini peneliti berfokus pada salah satu unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat (2015, dikutip dari Nasution dkk, hal 18) yaitu sistem

kemasyarakatan atau organisasi sosial dalam hal ini adalah posisi kaum perempuan Prancis di dalam institusi keluarga. Saat perempuan lahir, konstruksi masyarakat telah membangun identitas perempuan sebagai sosok yang lemah, dan keyakinan tersebut telah berakar hingga membudaya di masyarakat. Pada masa Renaissance, kehidupan masyarakat diatur sepenuhnya oleh gereja, agama menjadi salah satu faktor penyebab opresi terhadap perempuan. Tradisi patriarkal mengharuskan istri mengikuti aturan dari suami. Saat berhubungan seksual perempuan masih dianggap memberikan pelayanan kepada laki-laki yang membuat laki-laki tampak seperti tuan.

Secara signifikan kesadaran perempuan tentang posisi dan hak mereka terus meningkat. Hal ini menyebabkan budaya patriarki lambat laun memudar dan hanya sedikit perempuan yang bertahan pada struktur budaya patriarki dan sebagian lainnya memilih untuk membebaskan diri mereka dari kekangan laki-laki.

Berdasarkan data-data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor politik menjadi faktor utama yang melatarbelakangi munculnya MLF di Prancis dan *Women's Liberation Movement* di Amerika Serikat berdampak besar bagi perkembangan feminisme radikal di Prancis. Kaum perempuan Prancis mendapatkan hak, kesetaraan dan pengakuan di masyarakat dengan disahkannya berbagai undang-undang terkait posisi perempuan Prancis. Sementara itu, faktor sosial dan faktor budaya menjadi faktor pendukung. Tradisi patriarki dan dogma gerejalah yang memposisikan perempuan sebagai manusia lemah dan bergantung pada laki-laki.

4.2 Dampak *Mouvement de Libération des Femmes* Terhadap Perkembangan Feminisme Radikal di Prancis

4.2.1 Dampak Politis

Setelah MLF terjadi, semakin banyak undang-undang terkait dengan perempuan di Prancis disahkan oleh parlemen. Undang-undang tersebut dinilai semakin ramah terhadap kaum perempuan untuk memperoleh kesetaraan dengan laki-laki. Pada tahun 1972, perempuan yang bekerja mendapatkan gaji yang setara dengan laki-laki tanpa ada lagi perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin. Pada tanggal 23 Desember 1980, parlemen mewacanakan RUU kekerasan seksual dan tingkatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Tanggal 8 Maret 1982 menjadi momen penting bagi perempuan di seluruh dunia, pasalnya hari itu ditetapkan sebagai Hari Perempuan Internasional dan di saat yang sama Presiden François Mitterand dan parlemen mensosialisasikan kuota 30% peluang posisi perempuan di kursi pemerintahan dan merancang RUU anti-seksis dan kesetaraan gender di dunia kerja.

Dari pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah Prancis semakin memberi perhatian terhadap hak-hak perempuan sebagai warga negara aktif. Hal ini disinyalir sebagai kelanjutan perjuangan perempuan setelah *Mouvement de Libération des Femmes* terjadi.

4.2.2 Dampak Sosial

Setelah berlangsungnya MLF pada tahun 1970, berbagai gerakan radikal muncul yang diakomodir oleh pegiat feminis di Prancis. Secara militan, pegiat feminis semakin menunjukkan eksistensinya di seluruh aspek kehidupan seperti politik dan sosial. Meskipun MLF menjadi gerakan pembebasan yang sangat berpengaruh di Prancis, namun kemunculannya juga menimbulkan kontra. Feminisme lesbian menuding MLF hanya berfokus pada hak-hak perempuan heteroseksual dan mengesampingkan lesbianisme.

Munculnya Feminisme Lesbian

Feminisme lesbian berkembang di Amerika Serikat dan di beberapa negara Eropa, termasuk Prancis. Akhir tahun 1970 didirikan *Comité d'Urgence Anti-Répression Homosexuelle* (CUARH) atau Komite Darurat Anti-Penindasan Homoseksual oleh beberapa aktivis lesbian dan gay Prancis. Organisasi ini bertujuan untuk memayungi hak-hak kaum homoseksual di Prancis dan melawan rasisme, kapitalisme dan anti-homoseksual.¹⁹

Selanjutnya pada tahun 1971 terjadi peristiwa *Le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire* (FHAR) atau Front Homoseksual Aksi Revolusioner yang dipimpin oleh Guy Hocquenghem dan Françoise d'Eaubonne. Aksi ini diikuti oleh beberapa aktivis gay dan aktivis MLF lesbian yang menganggap MLF hanya mementingkan kaum borjuis dan kaum heteroseksual.²⁰ Feminisme lesbian

Prancis berfokus pada perjuangan hak-hak kaum lesbian yang mana pada tahun tersebut lesbianisme masih tabu di masyarakat.

Konstruksi maskulinitas yang membentuk budaya heteroseksual menjadi akar opresi terhadap perempuan, maka dari itu tujuan politis dari feminis lesbian yaitu sebagai landasan pembebasan perempuan, sebagai wujud pemberontakan otoritas laki-laki yang selalu mengatur perempuan bagaimana seharusnya berperangai, sebagai simbol penolakan dominasi seksual dan politik laki-laki, dengan lesbianisme perempuan menentang dunia laki-laki, ideologi dan anggapan tentang perempuan sebagai makhluk lemah. Aliran ini mengutamakan hak perempuan disaat dunia menyatakan supremasi terhadap laki-laki.²¹

Berdirinya FEMEN di Prancis

Pada awal pendiriannya tanggal 10 April 2008 FEMEN adalah organisasi feminis radikal Ukraina. Seiring perkembangannya, organisasi ini muncul di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Swiss, Jerman. Pada tahun 2012 organisasi ini muncul di Prancis, dan menjadikan Paris sebagai markas organisasi FEMEN. Dengan membawa ideologi sextremis, atheis dan feminis, organisasi ini memiliki tujuan menghapus patriarki. Manifestasi hak atas tubuhnya oleh perempuan dianggap sebagai langkah pertama dan paling penting untuk pembebasannya. Ketelanjangan perempuan, bebas dari sistem patriarki, adalah tujuan militan dan simbol sakral pembebasan perempuan. FEMEN banyak menentang institusi politik dan agama, dan cara mereka melakukan protes

menggunakan taktik sextremisme. Ini adalah bentuk provokasi yang tidak menggunakan kekerasan namun sangat agresif; bertelanjang dada.²²

Sebagai contoh, pada masa kampanye pemilihan Presiden Prancis 2017 lalu saat calon Presiden Marine Le Pen sedang melakukan pidato di Paris. Di tengah acara seorang anggota FEMEN mendobrak masuk dan berteriak ke seluruh ruangan bahwa program Marine Le Pen dianggap tidak mendukung emansipasi wanita Prancis dan tidak mendukung kesetaraan seks.²³

Dari dua gerakan feminisme radikal setelah peristiwa MLF, dapat disimpulkan bahwa pada era neoliberal saat itu, perempuan tidak lagi menuntut kesetaraan gender melainkan pembebasan akan tubuh perempuan itu sendiri dan keikutsertaannya di ruang publik.

4.2.3 Dampak Budaya

Secara garis besar, keberadaan feminis lesbian ingin mengubah konstruksi tatanan sosial masyarakat heteroseksual yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Prancis, dimana tidak lagi diwajibkan keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak karena feminisme lesbian meyakini bentuk keluarga heteroseksual tidak mengubah posisi perempuan yang tetap menjadi nomor dua dalam keluarga.

Pada 15 November 1999 pemerintah Prancis mengesahkan sebuah undang-undang, yaitu *Pacte Civil de Solidarité* atau *Pacs*. Undang undang ini mengatur hak dan kewajiban bagi pasangan yang hidup bersama tanpa ada

hubungan pernikahan. Undang- undang ini juga memperbolehkan pasangan heteroseksual maupun pasangan homoseksual, lesbian, biseksual dan transgender (LGBT) untuk tinggal dalam satu rumah.²⁴ Undang-undang ini yang menjadi cikal-bakal disahkannya undang-undang pernikahan sesama jenis pada tahun 2013. Dengan demikian, tatanan dalam satu keluarga tidak lagi terdiri dari ayah, ibu dan anak. Institusi keluarga sesama jenis juga dapat dikatakan sebagai sebuah keluarga.